

HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BERDEMOKRASI: ANALISIS KASUS PEMBUBARAN *PEOPLE'S WATER FORUM* DI BALI

Jhon Lihardo Sipayung¹, Gede Indra Pramana², Dr. Tedi Erviantono³

^{1,2,3}) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober, 2025

Revised Oktober, 2025

Accepted Oktober, 2025

Available online Oktober, 2025

Email:

lihardosipayung60@gmail.com

¹, indraprama@unud.ac.id²,

erviantono2@unud.ac.id³

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Tulisan ini menyajikan analisis mendalam tentang pembubaran People's Water Forum (PWF) di Bali, dengan mengeksplorasi dampaknya terhadap hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan demokrasi. Pembubaran mendadak PWF oleh pemerintah daerah pada tahun 2024, dengan alasan mengancam ketertiban umum dan keamanan negara, merupakan ancaman serius terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum internasional dan Indonesia. Meskipun upaya dilakukan oleh PWF dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali untuk mencari perlindungan hukum dan intervensi dari pihak berwenang, termasuk Polisi Bali dan Komnas HAM, tidak ada kemajuan signifikan dalam penyelidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, melalui kajian literatur dan wawancara mendalam dengan pihak yang terkait. Temuan menunjukkan bahwa insiden pembubaran PWF mencerminkan tren penurunan demokrasi di Indonesia, dengan kebebasan sipil yang ditekan.

Kata Kunci: HAM, People's Water Forum, Lembaga Bantuan Hukum Bali

ABSTRACT

This paper presents an in-depth analysis of the dissolution of the People's Water Forum (PWF) in Bali, examining its implications for human rights, freedom of expression, and democracy. The sudden disbandment of PWF by the local government in 2024, on the grounds of public order and national security threats, constitutes a serious violation of human rights guaranteed under both international and Indonesian law. Although PWF and the Bali Legal Aid Institute (LBH Bali) sought legal protection and intervention from relevant authorities, including the Bali Police and the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), no significant progress was made in the investigation. This study employs a descriptive qualitative method, relying on literature review and in-depth interviews with relevant stakeholders. The findings indicate that the dissolution of PWF reflects a broader trend of democratic backsliding in Indonesia, characterized by increasing restrictions on civil liberties.

Keywords: Human Rights, People's Water Forum, Bali Legal Aid Institute

1. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak fundamental yang universal sehingga setiap orang memiliki hak ini tanpa terkecuali. HAM adalah hak universal yang tidak dapat diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Indonesia menjamin hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada manusia dan abadi. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk mempunyai dan mengeluarkan pendapat, mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa pun tanpa mempertimbangkan lokasi geografis.. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu, termasuk hak untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan keadilan dalam masyarakat, kebebasan berpendapat dan berdemokrasi merupakan kepentingan yang harus ada dalam pemenuhan hak khususnya HAM.

Namun, dalam beberapa situasi, hak-hak ini dapat terancam oleh pembatasan atau pembubaran organisasi sipil yang bekerja untuk kepentingan umum.

Kasus pembubaran People's Water Forum di Bali merupakan salah satu contoh yang menunjukkan bagaimana hak asasi manusia dalam kebebasan berpendapat dan berdemokrasi dapat terancam. Oleh karena itu penting untuk meneliti Kasus pembubaran People's Water Forum di Bali ini lebih dalam untuk mengkaji tentang salah satu kasus pelanggaran HAM.

2. KAJIAN PUSTAKA

Menurut penelitian oleh Wahyuni dan Desiandri (2024) yang menekankan betapa pentingnya kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak dasar setiap orang di negara demokrasi seperti Indonesia. Kebebasan ini merupakan dasar kemerdekaan setiap orang. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bagaimana kebebasan berpendapat sering menjadi subjek perdebatan dan diatur. Ada beberapa kendala untuk kebebasan berpendapat, seperti peraturan yang tidak jelas, intervensi politik, dan konflik antara kebebasan berpendapat dan kepentingan nasional. Selain itu, pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi dianggap sangat penting dalam proses menuju kebebasan demokrasi di negara ini, karena menekankan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak individu serta memastikan bahwa ada lembaga dan sistem yang kuat untuk menjaga hak-hak individu.

Pratama, dkk (2022) juga berkata demikian, perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam konteks hak asasi manusia merupakan suatu kajian yang memiliki urgensi era saat ini. Terlebih prinsip-prinsip HAM yang harus dijunjung tinggi dalam pembatasan hak tersebut, serta kaitannya dengan demokrasi, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Sesuai dengan penelitian oleh Kusuma, dkk (2023) hasilnya dimana kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia yang harusnya sudah dijamin oleh konstitusi di Indonesia. Namun masih terdapat pembatasan dan larangan kebebasan berpendapat, baik secara lisan maupun tulisan, yang mempersempit ruang public untuk berpartisipasi dalam pemerolehan kebijakan.

Secara keseluruhan penelitian diatas memiliki kesamaan penekanan pada pentingnya kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak dasar manusia dalam konteks demokrasi. Ketiga penelitian ini sepakat bahwa kebebasan ini merupakan dasar kemerdekaan individu dan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak individu. Penelitian-penelitian tersw juga mengidentifikasi bahwa terdapat kendala dan pembatasan yang mempengaruhi kebebasan berpendapat, baik dalam bentuk peraturan yang tidak jelas, intervensi politik, konflik dengan kepentingan nasional, maupun dalam penggunaan media sosial. Selain itu, penelitian-penelitian ini menunjukkan kebutuhan untuk adanya perlindungan hukum yang kuat dan sistem yang efektif untuk menjaga hak-hak individu, serta menekankan pentingnya prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pembatasan hak dan kaitannya dengan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah alias riil. Penelitian kualitatif, karena sifatnya yang deskriptif dan seringkali menggunakan pendekatan analisis induktif, menempatkan proses dan makna dari perspektif subyek pada tingkat yang lebih tinggi (Fadli, 2021). Penelitian deskriptif bertujuan untuk memotret atau mengeksplorasi konteks sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor, dikutip oleh Lexy. J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari perilaku dan kata-kata tertulis atau lisan individu.¹

Metode penelitian dilakukan dengan teknik wawancara dan kajian literatur yang relevan. Wawancara dilakukan di kantor LBH Bali Jl. Plawa No. 57 Denpasar, pada Senin, 24 Juni 2024.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus pembubaran People's Water Forum di Bali menjadi contoh bagaimana hak asasi manusia, kebebasan berekspresi dan demokrasi bisa terancam. People's Water Forum atau PWF adalah organisasi yang berjuang untuk melindungi hak atas air di Bali dan memastikan akses yang adil dan berkelanjutan terhadap sumber daya air bagi semua orang. Namun pada tahun 2023, pemerintah daerah tiba-tiba memutuskan untuk membubarkan organisasi ini.

Alasan pemerintah membubarkan People's Water Forum menimbulkan banyak kontroversi. Mereka menilai organisasi tersebut telah melakukan tindakan yang menyabotase ketertiban umum dan keamanan negara. Namun tuduhan tersebut tidak didukung oleh bukti yang jelas dan transparan. Pembubaran tersebut resmi dibubarkan pada 20 Mei 2024 yang menimbulkan kekhawatiran akan adanya tindakan keras terhadap kebebasan berekspresi dan demokrasi di Bali.

Menurut LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Bali merespon kasus ini sangat menilai bahwa peristiwa ini ironis sekali karena ditahun yang sama data indeks demokrasi tertinggi daripada ditahun-tahun sebelumnya. Banyak sekali usaha-usaha yang telah dilakukan dari pihak PWF dan untuk mendapatkan hak-haknya. LBH Bali ikut membantu dengan menghubungi lembaga-lembaga yang berwenang seperti Polda Bali dan Komnas HAM tapi tidak ada tindak lanjut dan intervensi apapun. Hasil wawancara dengan pihak LBH menekankan seriusnya situasi ini, menggambarkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak untuk berkumpul, berekspresi, dan berpendapat. LBH Bali terlibat dalam PWF dan telah berupaya melakukan advokasi bantuan hukum sebagai respons terhadap insiden tersebut.

Aspek Indeks	Indeks Demokrasi Provinsi Bali Menurut Aspek		
	2021	2022	2023
Kebebasan	84,62	85,78	85,23
Kesetaraan	77,25	83,90	85,75
Kapasitas Lembaga Demokrasi	63,92	79,83	84,28
Skor Indeks Demokrasi	75,35	83,21	85,13

¹ Lexy J. Moleong, 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Tabel 4. 1. Indeks Demokrasi Provinsi Bali 2021-2023 Oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Meskipun Indeks Demokrasi Provinsi Bali menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahun, dengan skor keseluruhan yang naik dari 75,35 pada tahun 2021 menjadi 85,13 pada tahun 2023, ironisnya masih terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus pembubaran People's Water Forum di Bali. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara angka dan aspek seperti kebebasan, kesetaraan, serta kapasitas lembaga demokrasi terlihat membaik, realitas di lapangan masih memperlihatkan adanya tindakan represif yang mencederai prinsip-prinsip demokrasi yang sejatinya ingin dicapai.

Kronologi kejadian pembubaran ini dirasakan indikasinya sejak pembatalan Kerjasama dengan rector ISI yang sebelumnya menerima untuk bekerja sama dengan PWF. Setelah mendekati acara, PWF menghadapi intervensi dan intimidasi berulang kali dari intelijen polisi dan pihak berwenang lainnya, yang mengakibatkan acara dibatalkan dan dipindahkan beberapa kali. Pada hari acara, beberapa ormas secara fisik mencampuri, yang mengakibatkan penyitaan karya seni dan ekspresi ketidaksetujuan terhadap PWF.

LBH Bali menjelaskan bahwa meskipun upaya untuk meminta perlindungan hukum dan melobi pihak-pihak terkait, termasuk ormas yang menghalangi pada saat itu, keterlibatan negara dalam penindasan PWF sangat jelas. Sudah mengajukan laporan polisi untuk pencurian dengan kekerasan, kekerasan bersama-sama atau penganiayaan, dan perampasan kemerdekaan, tetapi tidak ada kemajuan signifikan dalam penyelidikan polisi.

Disisi lain banyak dugaan pembubaran PWF didorong oleh kepentingan pemerintah untuk memastikan investasi untuk proyek infrastruktur air, karena PWF dianggap sebagai titik lawan dari World Water Forum yang lebih berorientasi pada elit. Insiden ini mencerminkan tren penurunan demokrasi di Indonesia, dengan kebebasan sipil yang ditekan.

Pembubaran People's Water Forum (PWF) yang dibahas merupakan ilustrasi nyata bagaimana hak untuk berkumpul, berekspresi, dan berpendapat dapat diabaikan, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dasar. Insiden ini menunjukkan bahwa meskipun Bali memiliki skor indeks demokrasi yang tinggi, masih terdapat praktik represi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. LBH Bali, sebagai lembaga yang berkomitmen untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia, berupaya melakukan advokasi hukum dan mendorong penegakan hukum yang adil dalam kasus PWF, menegaskan pentingnya kebebasan sipil dalam sebuah masyarakat demokratis.

5. KESIMPULAN

Analisis kasus pembubaran People's Water Forum (PWF) di Bali menunjukkan bahwa terdapat ancaman nyata terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi dan demokrasi, dalam masyarakat Indonesia. Pembubaran PWF oleh pemerintah daerah Bali tanpa bukti yang jelas dan transparan menimbulkan kekhawatiran akan penekanan terhadap kebebasan sipil dan hak-hak dasar individu. Meskipun Bali memiliki indeks demokrasi yang tinggi, insiden ini menunjukkan bahwa masih terdapat praktik represi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam rangka mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat pembubaran People's Water Forum (PWF) di Bali, diperlukan langkah-langkah korektif dan pencegahan yang komprehensif. Pemerintah daerah Bali dan pemangku kepentingan yang terkait sebaiknya mengambil langkah-langkah untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi dan demokrasi, sesuai dengan hukum nasional dan internasional. Investigasi yang lebih mendalam dan transparan diperlukan untuk mengungkapkan alasan

sebenarnya di balik pembubaran PWF dan memastikan tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali dan organisasi masyarakat sipil lainnya harus terus melakukan advokasi dan mempromosikan hak asasi manusia, serta mendorong penegakan hukum yang adil dan tidak memihak. Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat tentang hak asasi manusia dan demokrasi juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

6. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Indeks Demokrasi Provinsi Bali 2021-2023.

Charles Tilly, Democracy, New York: Cambridge University Press, 2007, hal 8.

Fadli, Muhammad Rijal. 2021. Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum.

Kusuma, dkk. 2023. Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Sanskara Hukum dan HAM.

Lexy J. Moleong, 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966.

Pratama, dkk. 2022. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3, No. 1.

Wahyuni, Desiandri. 2024. Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi dalam Negara Demokrasi di Indonesia. Jurnal Sains dan Teknologi.